



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan/atau paspor dinas dari Republik Serbia;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/ Service Passports*) pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



Nanik Purwanti



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia, selanjutnya disebut “Para Pihak”;

MENIMBANG hubungan bilateral antara kedua negara

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan bilateral kedua negara dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas dari kedua Pihak di masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut;

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Serbia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk.

2. Warga Negara Serbia, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lain.

PASAL 3

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

1. Warga negara dari masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas dan ditugaskan di wilayah Pihak lainnya sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler atau perwakilan untuk organisasi internasional beserta anggota keluarga inti mereka wajib memperoleh visa yang sesuai dari misi diplomatik atau pos konsuler Pihak lain sebelum memasuki wilayah Pihak lain tersebut.
2. Selama periode tugasnya, orang yang disebutkan di atas yang merupakan pemegang izin tinggal dan kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pihak penerima, dapat meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Pihak lain tersebut tanpa Visa, selama izin tinggal dan Kartu Identitas Diri mereka masih berlaku dan dapat ditunjukkan pada saat masuk bersama dengan paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku.

PASAL 4

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga Negara dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 3 Persetujuan ini dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, pada setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas internasional, tanpa batasan, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.

PASAL 5

HAK PEJABAT BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara Pihak lain ketika memasuki wilayahnya dan tinggal di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum nasional yang mengatur tentang masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.
2. Persetujuan ini tidak membatasi hak pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau meninggalkan atau memperpendek masa tinggal pemegang paspor diplomatik dan dinas dari Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 3 dari Persetujuan ini, apabila mereka dinyatakan sebagai *persona non grata* atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional, tanpa harus memberikan alasan untuk keputusan tersebut.

PASAL 6

PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak berhak menunda sementara pelaksanaan Persetujuan ini secara keseluruhan maupun sebagian untuk alasan-alasan keamanan nasional, keamanan masyarakat, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.
2. Masing-masing Pihak wajib segera memberitahukan kepada Pihak lain tentang penangguhan tersebut beserta kelanjutan pelaksanaan dari Persetujuan tersebut melalui saluran diplomatik.

PASAL 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, atau modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, mengenai setiap perubahan, melalui saluran diplomatik, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinas di wilayah Pihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler dari negara mereka. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya, wajib menerbitkan suatu paspor atau dokumen perjalanan yang baru untuk kembali ke negaranya.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, dengan persetujuan bersama Para Pihak, yang wajib dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini dan mulai berlaku sesuai dengan Pasal 10.

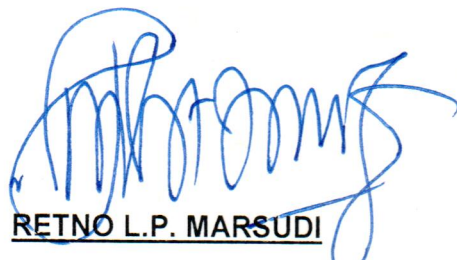
PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak telah saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua prosedur internal yang dipersyaratkan sesuai hukum nasionalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, atas keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib mulai berakhir 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L.P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SERBIA**



SRDJAN VERBIĆ
MENTERI PENDIDIKAN, ILMU
PENGETAHUAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI



REPUBLIK INDONESIA

**СПОРАЗУМ
ИЗМЕЋУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ
ПАСОША**

Влада Републике Индонезије и Влада Републике Србије (у даљем тексту „уговорне стране”),

Имајући у виду билатералне односе између уговорних страна,

У жељи да ојачају билатералне односе како би се олакшало путовање држављана две државе, носилаца дипломатских и службених пасоша,

У складу са важећим законима и прописима две земље,

Постигле су следећи споразум:

Члан 1.

УКИДАЊЕ ВИЗА

1. Држављани Републике Индонезије који су носиоци важећег дипломатског и службеног пасоша, немају обавезу прибављања визе за улазак, транзит и боравак на територији Републике Србије за период боравака највише до 30 (тридесет) дана од датума уласка.

2. Држављани Републике Србије који су носиоци важећег дипломатског и службеног пасоша, немају обавезу прибављања визе за улазак, транзит и боравак на територији Републике Индонезије за период боравака највише до 30 (тридесет) дана од датума уласка.

Члан 2.

РОК ВАЖЕЊА ПАСОША

Рок важења дипломатских и службених пасоша држављана уговорних страна пре датума уласка на територију државе друге уговорне стране не може бити краћи од 6 (шест) месеци.

Члан 3.

ВИЗЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ДИПЛОМАТСКИХ МИСИЈА ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА

1. Држављани држава уговорних страна који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, који се упућују на дужност на територију државе друге уговорне стране у својству чланова дипломатско-конзуларног представништва или представника међународних организација, као и чланови њихових породица који чине део њиховог домаћинства, обавезни су да од дипломатско-конзуларног представништва државе друге уговорне стране, пре уласка, прибаве одговарајућу улазну визу.
2. За време трајања свог мандата, лица која имају дозволу боравака и личну карту коју је издала страна пријема, могу напустити и поново ући на територију државе друге уговорне стране без визе, ако су њихова дозвола боравака и лична карта важећи и ако их при

уласку, покажу заједно са важећим дипломатским или службеним пасошем.

Члан 4.

УСЛОВИ УЛАСКА И ИЗЛАСКА

Држављани држава уговорних страна из чл. 1. и 3. овог споразума могу да уђу и да напусте територију државе друге уговорне стране на било ком граничном прелазу отвореном за међународни саобраћај, без било каквих ограничења, осим оних који су прописани у безбедносним, миграционим, царинским и санитарним прописима на уласку, и другим прописима који се односе на носиоце таквих важећих пасоша.

Члан 5.

ПРАВА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

1. Овим споразумом се не изузимају држављани државе било које уговорне стране од обавезе да поштују законе и прописе који су на снази у држави друге уговорне стране приликом уласка и боравака на њеној територији, укључујући, али не ограничавајући се на национално законодавство уговорних страна који се односе на улазак, транзит и боравак страних држављана.
2. Овим споразумом се не ограничава право надлежних органа две уговорне стране да забране улазак или излазак или да скрате боравак носиоцима дипломатских или службених пасоша друге уговорне стране наведених у члану 1. и члану 3. овог споразума, без образложења, ако та лица имају статус *persona non grata* или се сматра да она могу да угрозе јавни ред и мир, здравље становништва или националну безбедност.

Члан 6.

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉАЊЕ ПРИМЕНЕ

1. Свака уговорна страна може привремено да обустави примену овог споразума, у целини или делимично, из разлога националне безбедности, јавног реда и мира или здравља.
2. Уговорне стране без одлагања обавестиће се писмено, дипломатским путем, о обустави примене овог споразума, као и о поновној примени овог споразума.

ЧЛАН 7.

УЗОРЦИ И ИЗДАВАЊЕ ПАСОША ИЛИ ПУТНИХ ИСПРАВА

1. Уговорне стране дипломатским путем размениће узорке својих важећих дипломатских и службених пасоша најкасније 30 (тридесет) дана пре ступања на снагу овог споразума.
2. Уколико дође до увођења нових дипломатских или службених пасоша, или измене постојећих дипломатских или службених пасоша, уговорне стране о тим изменама обавестиће једна другу у писаном облику, дипломатским путем, најкасније 30 (тридесет) дана пре њиховог стављања у употребу.
3. У случају да држављани државе било које стране изгубе дипломатски или службени пасош, или дође до оштећења њиховог дипломатског или службеног пасоша на територији државе друге уговорне стране, они ће одмах о томе обавестити надлежне органе у држави пријема преко дипломатско-конзуларног представништва земље свог порекла. Дипломатско-конзуларно представништво, у складу са законима и прописима своје земље, издаће тим лицима исправе за повратак у земљу порекла

Члан 8.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Све разлике у погледу тумачења, или спорови који настану у примени одредби овог споразума решаваће се у духу пријатељства, дипломатским путем, консултацијама или преговорима две уговорне стране.

Члан 9.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Овај споразумом се може изменити или допунити узајамном сагласношћу уговорних страна, и измене или допуне представљаће саставни део овог споразума и ступају на снагу у складу са чланом 10.

Члан 10.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ТРАЈАЊЕ И РАСКИД

1. Овај споразум ступа на снагу 30 (тридесет) дана од дана пријема последњег писменог обавештења у којем уговорне стране обавештавају једна другу, дипломатским путем, да су окончане све унутрашње процедуре прописане националним законодавством за његово ступање на снагу.
2. Овај споразум се закључује на неодређено време.
3. Свака уговорна страна може раскинути овај споразум у било ком тренутку тако што ће писмено, дипломатским путем, обавестити другу уговорну страну о својој намери да раскине овај споразум. Споразум престаје да важи 60 (шездесет) дана од датума пријема таквог обавештења.

У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени од својих
Влада, потписали овај споразум,

Сачињен у Џакарти, 27 априла 2016. године, у два оригинална
примерка, сваки на индонежанском, српском и енглеском језику, при
чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају различитог
тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ



Министар иностраних послова
Републике Индонезије
Ретно Л.П. Марсуди

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Министар просвете, науке и
технолошког развоја
Републике Србије
Срђан Вербић



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia, hereinafter referred to as the **“Contracting Parties”**,

CONSIDERING the bilateral relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their bilateral relations with a view to facilitating the entry of holders of diplomatic and official/service passports of the two contracting Parties into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic and service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Serbia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

2. Nationals of the Republic of Serbia, holders of valid diplomatic and official passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2

PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of the contracting Parties shall be at least 6 (six) months before the day of entry into the state territory of the other Party.

ARTICLE 3

VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POSTS

1. Nationals of the contracting Parties who are holders of valid diplomatic or official/service passports and assigned in the territory of the other Party as members of the diplomatic mission or consular post, or representatives to international organizations, and member of their families forming part of their household shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry.
2. During the period of their assignment, the above mentioned persons who are holders of a residence permit and ID Card issued by the receiving Party may leave and re-enter the territory of the other Party without Visa, as long as their residence permit and ID Card are still valid and presented at entry along with a valid diplomatic or official/service passport.

ARTICLE 4

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the contracting Parties referred to in Article 1 and 3 of this Agreement, may enter into and depart from the state territory of the other Party, at any border-crossing point open to international traffic, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions applicable to holders of such valid passports.

ARTICLE 5

RIGHTS OF COMPETENT AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of the state of either Party from the obligations to abide by the laws and regulations in force in the state of the other Party when entering its territory and staying in it, including but not limited to the national laws concerning the entry, stay and exit of foreign nationals.
2. This Agreement shall not restrict the right of the competent authorities of the Parties to refuse the entry or leave or shorten the stay of the holders of diplomatic and official/service passport of the other contracting Party referred to in Articles 1 and 3 of this Agreement, provided that those persons are considered as *persona non grata* or persons likely to endanger public peace, public order, public health or national security, without providing reasons for their decision.

ARTICLE 6

SUSPENSION

1. Either contracting Party may temporarily suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The contracting Parties shall promptly notify the other Party about the said suspension, as well as resumption to implement this Agreement, through diplomatic channels.

ARTICLE 7

SPECIMENS AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their valid diplomatic and official/service passport not later than 30 (thirty) days before entry into force of this Agreement.
2. If new diplomatic or official/service passports are introduced, or the existing diplomatic or official/service passports are modified, the contracting Parties shall inform each other in writing, of any changes, through diplomatic channels, no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. If a national of either Party loses his/her diplomatic or official/service passport, or if it is damaged in the territory of the State of the other Party, he/she shall promptly inform the competent authorities of the receiving State via the diplomatic mission or consular post of their country of origin. The diplomatic mission or consular post concerned, in accordance with the laws and regulations of its country, shall issue such a national with a travel document to return to his/her country of origin.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised, by the mutual consent of Parties, which shall be formed as an integral part of the present Agreement and shall enter into force according to Article 10.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of receipt of the last written notification in which the contracting Parties have informed each other, through diplomatic channels, that all internal procedures prescribed by their national laws for the entry into force of the Agreement, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.
3. Each contracting Party may terminate this Agreement any time by notifying the other contracting Party, through diplomatic channels, of its intention to terminate the operation of this Agreement. The Agreement shall cease to be in force 60 (sixty) days from the date of the receipt of such notifications.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement,

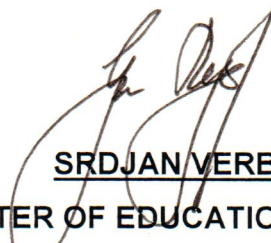
DONE in Jakarta, on Wednesday, 27 April 2016, in two originals, each in Indonesian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SERBIA**



SRDJAN VERBIĆ
**MINISTER OF EDUCATION, SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPEMENT**